

Pelabuhan Buluminung Bakal Kembali Dikelola Perumda



Sumber gambar :TribunKaltim.co Jumat,19/07/2024

PENAJAM, TRIBUN – Pengelolaan Pelabuhan Benuo Taka di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) rencananya akan kembali diserahkan kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Benuo Taka.

Dijelaskan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) PPU, Alimuddin mengatakan jika dikerjasamakan dengan Perumda, maka upaya untuk mempercepat pembangunan berbagai fasilitas di pelabuhan bisa dilakukan.

Apabila hanya mengandalkan dari pemerintah daerah, kata dia tentu membutuhkan waktu yang cukup lama karena anggaran yang dimiliki daerah juga terbatas. “Itu kita dorong karena APBD kita kecil, sedangkan membangun pelabuhan itu dananya besar tidak cukup dengan ratusan miliar, kalau ada orang siap dalam pembiayaan ya kenapa tidak,” ungkapnya, Rabu (17/7).

Pengelolaan ini akan dilakukan dengan sistem kerjasama. Artinya ada bagian yang dikelola khusus oleh Perumda dan ada yang tetap dibawah kendali Dishub. Alimuddin menyebut bahwa hal itu masih dalam tahap pembahasan, tetapi untuk retribusi tetap menjadi kewenangan dari pemerintah daerah.

Selain itu, target pendapatan dari sisi pelabuhan apabila ada campur tangan Perumda Benuo Taka, maka dipastikan juga akan dinaikkan serta dievaluasi setiap tahunnya. Dasar dari kerjasama ini bahkan telah rampung sejak beberapa waktu lalu, yakni melalui Peraturan Bupati (Perbup). “Peraturan Bupati untuk menugaskan Perumda itu sudah ada, implementasinya melalui proses siapa berbuat apa, supaya tidak ada celah untuk *loss* pendapatan,” sambungnya.

Rencana menarik kembali Perumda Benuo Taka dalam aktivitas Pelabuhan Buluminung, telah melalui pertimbangan yang matang. Bahkan sampai menyertakan pengacara negara, agar tidak lagi terjerat persoalan hukum nantinya. “Sudah kita dorong itu, dulu sudah pernah dilaksanakan tapi kita memahami bersama bahwa itu ada

persoalan sedikit,” ujarnya. Sebelumnya, pengelolaan pelabuhan menjadi target penyidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) PPU, terutama dari sisi pendapatan. Kondisi itu terjadi tepat saat pelabuhan juga diserahkan pengelolaannya kepada Perumda.

Pengelolaan keuangan di Perumda Benua Taka dianggap bermasalah, sehingga terlibat dalam kasus korupsi. Terdapat pengurangan jumlah retribusi yang dilaporkan oleh Perumda dan tidak sesuai dengan aktivitas bongkar muat di dalamnya. **(taa)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pelabuhan Buluminung Bakal Kembali Dikelola Perumda, 19/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Permenhub 50/2021), pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
2. Diatur dalam Pasal 3 Permenhub 50/2021 bahwa penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. otoritas pelabuhan atau kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
 - b. unit penyelenggara pelabuhan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
3. Dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Permenhub 50/2021 diatur sebagai berikut:
 - (1) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berperan sebagai wakil Pemerintah untuk memberikan konsesi atau bentuk kerjasama lainnya kepada badan usaha pelabuhan untuk melakukan kegiatan perusahaan di pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian.
 - (2) Bentuk kerjasama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kerjasama pemanfaatan;
 - b. persewaan;
 - c. kontrak manajemen; dan
 - d. kerjasama operasi.